



**PENGAWASAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN
UMUM DI KOTA SUNGAI PENUH**

TESIS

*Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum*

Oleh :

DARA MONIKA
NIM: 2220112019



**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2025**

PENGAWASAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DI KOTA SUNGAI PENUH

(Dara Monika, 2220112019, 164 Halaman, Program Studi Magister Hukum
Universitas Andalas, 2025)

ABSTRAK

Retribusi menjadi salah satu sumber penghasilan yang diperoleh oleh daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dapat mendukung pembiayaan dalam pembangunan. Satu diantara jenis retribusi yang dikelola daerah yaitu retribusi parkir ditepi jalan umum. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mengenai Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah merupakan dasar hukum parkir ditepi jalan umum. Daerah diberi kewenangan dalam mengatur mengenai retribusi parkir seperti penetapan tarif dan pemilihan lokasi, diatur dalam Perda No.2 Tahun 2016 mengenai Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum. Dalam mewujudkan retribusi yang mencapai target tentu harus adanya pengelolaan dan pengawasan dari pemerintah daerah dengan baik, baik itu Dishub sebagai pengelola dan pemungut retribusi, DPRD sebagai fungsi legislasi yang menyusun dan menetapkan Perda, melihat apakah implementasinya sesuai dengan ketentuan, Satpol PP sebagai penegak perda, menertibkan jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dan sebagai masyarakat wajib mempunyai kesadaran yang tinggi bahwa pendapatan dari pemungutan retribusi parkir adalah untuk kepentingan PAD. Permasalahan yang penulis kaji adalah; **pertama;** Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Sungai Penuh dalam mencapai target pendapatan dari pemungutan tarif retribusi parkir ditepi jalan umum. **Kedua;** Bagaimana sistem pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum **Ketiga;** Bagaimana penegakan hukum terhadap pemungutan retribusi parkir yang tidak memiliki izin resmi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pengawasan secara internal dan eksternal menjawab permasalahan satu, teori kewenangan relevan dengan permasalahan ini untuk melihat siapa yang berwenang dan sejauh apa kewenangan tersebut dapat dilakukan, teori ini menjawab permasalahan dua, selanjutnya teori sistem hukum yang di kemukakan oleh Lawrence M. Friedman yang memiliki tiga komponen utama yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum yang menjawab permasalahan tiga. Penelitian ini menggunakan pendekatan *juridis empiris*, yakni pendekatan yang didasarkan pada penelitian lapangan sebagai sumber data primer. Untuk melengkapi dan mendukung data lapangan tersebut, diperlukan data kepustakaan sebagai sumber data sekunder. Data primer dikumpulkan dengan cara wawancara kepada informan. Dishub, Satpol PP, DPRD, Bakeuda, Juru Parkir dan Masyarakat Pengguna Parkir. Data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Seluruh data yang didapat dari penelitian lapangan maupun kepustakaan, dianalisa secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Berdasarkan hasil analisa, dapat disimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh beberapa pihak terkait belum efektif, dapat dilihat dari tidak tercapainya target retribusi dari sektor parkir. Sistem pemungutan retribusi pun tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan, dilihat dari penarikan yang tidak menggunakan karcis dan penyeteroran hasil retribusi tidak dilakukan perhari. Penegakan hukum terhadap pelanggarpun tidak efektif, dapat dilihat dengan masih banyaknya parkir liar dan pungutan liar di titik parkir resmi maupun yang tidak resmi.

Kata Kunci: Pengawasan, Pemungutan Retribusi, Parkir Ditepi Jalan Umum

**SUPERVISION OF PARKING RETRIBUTION COLLECTION ON PUBLIC
ROADS IN SUNGAI PENUH CITY**

*(Dara Monika, 2220112019, 164 Pages, Master of Law Program, Andalas
University, 2025)*

ABSTRACT

*Retribution is one of the sources of revenue obtained by regions to enhance community welfare and support financing for development. One type of retribution managed by the region is parking retribution on public roads. Parking on public roads falls under general service retribution, which is regulated by Law No. 1 of 2022 concerning Financial Relations between the Central Government and Regional Governments. Regions are also granted the authority to regulate parking retribution, including setting tariffs and selecting locations, as outlined in Regional Regulation No. 2 of 2016 on Parking Retribution on Public Roads. To achieve the targeted retribution, effective management and supervision by the local government are essential. This includes the Transportation Department as the manager and collector of retribution, the Regional People's Representative Council (DPRD) performing its legislative function by drafting and enacting regulations, ensuring implementation complies with the provisions, the Civil Service Police Unit (Satpol PP) enforcing local regulations, and the public needing to be highly aware that revenue from parking retribution is for the benefit of local revenue (PAD). The issues addressed in this study are: **First**, how does the Government of Sungai Penuh supervise the achievement of revenue targets from parking retribution collection on public roads? **Second**, what is the system of collecting parking retribution on public roads? **Third**, how is law enforcement conducted regarding parking retribution collection without official permits? The theory used in this research includes internal and external oversight theory, which addresses the first problem. Next is the tax collection system theory, using the official assessment system framework, where the collection of retribution fees is conducted directly, applying transparency and accountability, which addresses the second problem. Lastly, Lawrence M. Friedman legal system theory is applied, which comprises three main components: legal structure, legal substance, and legal culture, addressing the third problem. This research employs an empirical legal approach, utilizing field research as primary data and supporting it with library data as secondary data. Primary data is obtained through interviews with informants from the Transportation Department, Satpol PP, DPRD, Regional Revenue Agency (Bakeuda), parking attendants, and parking users, while secondary data is collected through literature studies. All data obtained from field research and literature will be analyzed qualitatively and presented descriptively. Based on the research findings, it is concluded that the supervision conducted by several relevant parties is not effective, as evidenced by the failure to meet revenue targets from the parking sector. The parking retribution collection system is also not implemented in accordance with regulations, as seen from the lack of ticket issuance and the failure to deposit retribution revenues daily. Law enforcement against violators is ineffective, as indicated by the prevalence of illegal parking and illegal fees at both official and unofficial parking spots.*

Keywords: Supervision, Retribution Collection, Parking on Public Roads